

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap institusi diwajibkan menyusun Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sintang, 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG



Drs. HATTA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610425 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39
4.2. Strategi dan Kebijakan	43
 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
 BAB VII PENUTUP	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap institusi diwajibkan menyusun Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk



mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, mandiri dan sejahtera. Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan penyediaan sarana transportasi angkutan sudah barang tentu dapat mewujudkan transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman dengan memberikan pelayanan prima kepada publik, serta dapat menjangkau daerah pedalaman, guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Mengingat kondisi geografis daerah yang cukup berat mengakibatkan upaya menyediakan transportasi publik yang dapat memadai dan menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat masih belum dapat maksimal dilakukan. Akses jalan belum dapat mencapai hingga ke seluruh kecamatan dan desa serta tidak terpeliharanya jalan menyebabkan angkutan sungai masih menjadi primadona masyarakat dalam bertransportasi.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;



23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu untuk memberikan arah pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui rumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
2. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;



3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
dan
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Jalan;

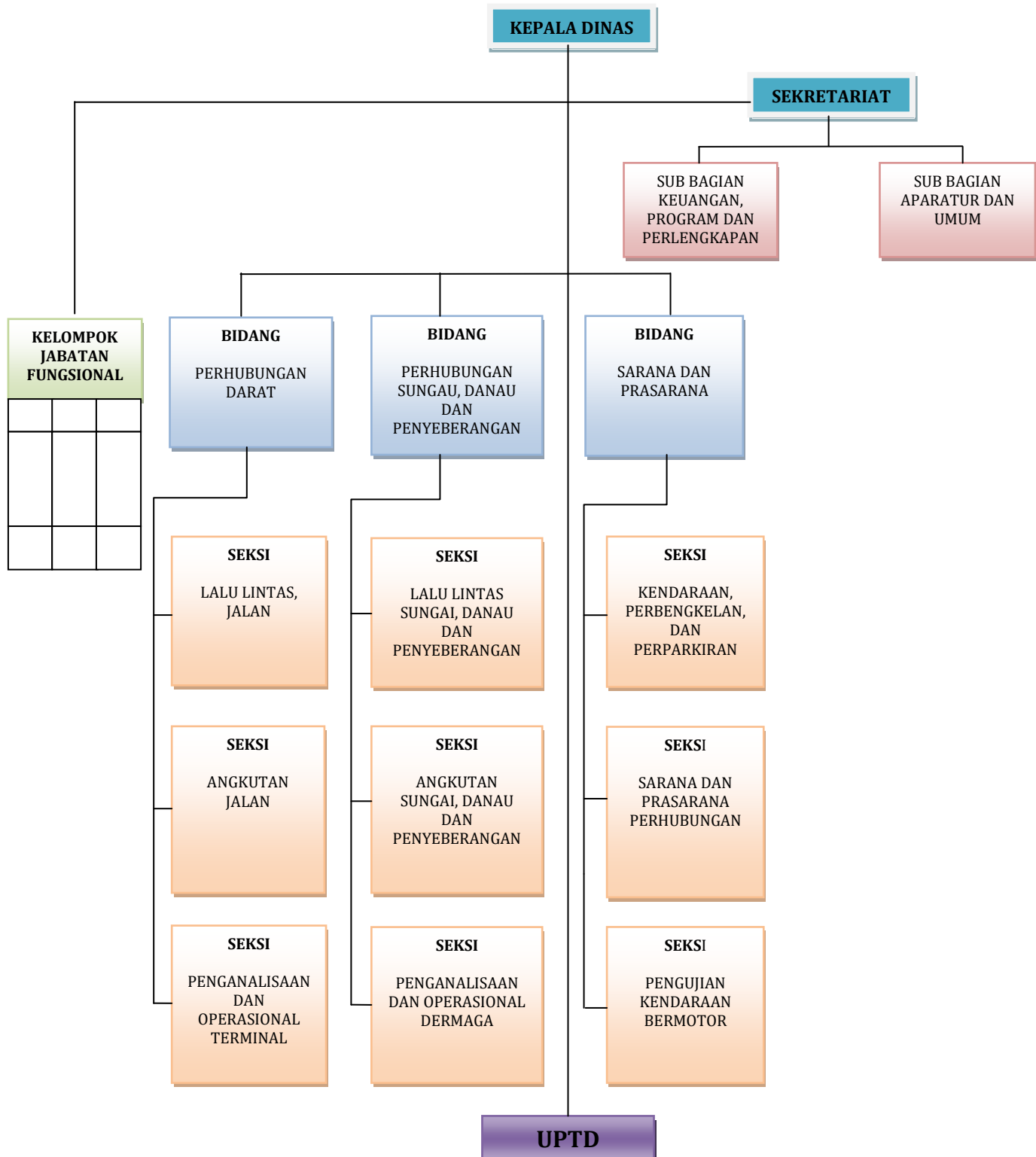


- 2) Seksi Angkutan Jalan; dan
- 3) Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal.
- b. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - 3) Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kendaraan, Perbengkelan dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - 3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
 (Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2016/PERBUP Nomor 124 Tahun 2016)





2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, bahwa tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam bidang Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyusunan program kerja Dinas Perhubungan;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- d. perumusan penjabaran kebijakan dalam bidang Perhubungan;
- e. pemberian pertimbangan teknis di bidang Perhubungan;
- f. pembinaan UPTD di bidang Perhubungan;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Perhubungan;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- i. penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;



- j. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- m. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perhubungan;
- n. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip dan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretris Dinas mempunyai fungsi :

- a. mengelola administrasi umum, kepegawaiaan, keuangan, arsip dan barang;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan



- kegiatan di bidang Perhubungan;
- c. menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perhubungan;
 - d. menghimpun, menyusun dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Perhubungan;
 - e. meneliti dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
 - f. melaksanakan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan member petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - g. mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Perhubungan;
 - h. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi keuangan, program, perlengkapan, aparatur dan umum.



B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Darat

Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Perhubungan Darat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Perhubungan Darat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan bidang Perhubungan Darat;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- c. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Bidang Perhubungan Darat;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang perhubungan darat;
- g. Mendistribusikan dan mengoodinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala seksi;
- h. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan orang dan barang di jalan sesuai peraturan



- perundang- undangan;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penetapan tarif di bidang perhubungan darat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan darat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan lalu lintas jalan dan angkutan jalan serta teknik sarana dan prasarana jalan;
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
 - m. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria, perizinan, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perhubungan darat;
 - n. Perencanaan dan analisis kebutuhan rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan sesuai dengan kewenangan;
 - o. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. Penyelenggaraan pengawasan dan perizinan pengangkutan orang dan barang di jalan;
 - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
 - r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala



Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan dan penganalisaan dan operasional terminal.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan Sungai, Danau dan



Penyeberangan

- e. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- g. Merumuskan kebijakan penetapan tarif retribusi/pendapatan daerah di bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Perencanaan analisis kebutuhan alat pemberi isyarat dan rambu-rambu lalu lintas sungai sesuai dengan kewenangannya;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan pengawasan dan perizinan pengangkutan orang dan barang di Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai kewenangannya;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Ruang lingkup bidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan meliputi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan penganalisaan dan operasional dermaga.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Perhubungan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program kerja tahunan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, menyusun, dan pengoordinasian program kerja dan laporan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Menyiapkan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai meliputi terminal, halte, jembatan penyeberangan orang, pelabuhan/dermaga/stegher;



- f. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan dan perparkiran;
- g. Menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perparkiran, pengujian kendaraan dan perbengkelan;
- h. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan sarana dan prasarana meliputi kendaraan, perbengkelan dan perparkiran, sarana dan prasarana perhubungan dan pengujian kendaraan bermotor.



2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sampai dengan 31 Desember 2015 memiliki 60 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data PNS Dishubkominfo Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Tahun 2015

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1	Juru Muda/ I/a	1
2	Juru Muda Tk. I/I/b	-
3	Juru/I/c	-
4	Juru Tk. I/I/d	-
5	Pengatur Muda/II/a	7
6	Pengatur Muda Tk.I/II/b	11
7	Pengatur/II/c	6
8	Pengatur Tk. I/II/d	2
9	Penata Muda/III/a	7
10	Penata Muda Tk.I/III/b	5
11	Penata/III/c	6
12	Penata Tk.I/III/d	9
13	Pembina/IV/a	3
14	Pembina Tk.I/IV/b	1
15	Pembina Utama Muda/IV/c	1
16	Pembina Utama Madya/IV/d	-

Tabel 2.2
Data PNS Dishubkominfo Kabupaten Sintang
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No.	Umur	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	21-30 tahun	3	-
2	31-40 tahun	22	3
3	41-50 tahun	15	-
4	51-60 tahun	17	
	Jumlah	57	3



Tabel 2.3
Data PNS Dishubkominformo Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tahun 2015

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	1
2	SLTP	1
3	SMA	34
4	D3	3
5	Strata 1	15
5	Strata 2	5

Tabel 2.4
Data Honorer
Dishubkominformo Kabupaten Sintang Tahun 2015

No.	Nama	Pendidikan	Tugas
1	Nurmaya, SE	S1	Staf Teknis Subbag Keuangan dan Program
2	Suwarni, S.Pd	S1	Staf Teknis Subbag Keuangan dan Program
3	Eko Susanto, S.Sos	S1	Staf Subbag Aparatur dan Umum
4	Isna Sabtia K, A.Md.LLAJ	D3	Staf Administrasi Bidang Sarana dan Prasarana
5	Sudiono	SMA	Staf Teknis Subbag Keuangan dan Program
6	Mirjanudin	SMA	Staf Teknis Bidang Perhubungan Darat
7	Yedi Heriyadi	SMA	Supir Mobil M-PLIK
8	Yulianus	SMA	Staf Teknis Subbag Keuangan dan Program
9	Kristian Suwandi L.	SMA	Supir Kepala Dinas
10	Eko Priyatno	SMA	Staf Administrasi Bidang Perhubungan Darat
11	Tri Handoko	SMA	Petugas Kebersihan Terminal
12	Endah Sriwinarti	SMA	Petugas Kebersihan Terminal
13	Asrori	SMA	Petugas Kebersihan Terminal
14	Fetrus	SMA	Petugas Kebersihan Terminal
15	Zulfiqar	SMA	Petugas Kebersihan Terminal



2.2.2. Aset

Dalam pelaksanaan tugas diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tidak menjadi alasan tidak terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Namun sebaliknya, harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan secara terus menerus berupaya meningkatkan kekurangan tersebut.

Sampai dengan periode tahun 2014, posisi Neraca Dinas Perhubungan per 31 Desember 2015 menunjukkan keadaan aset tetap sebesar Rp. 51.303.852.603,62 .

Tabel 2.5
Neraca
Tahun 2014
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Per 31 Des 2014 (Rp.)	Per 31 Des 2013 (Rp.)
1.	Tanah	2.201.621.240,44	2.201.621.240,44
2.	Peralatan dan Mesin	8.549.890.619,00	7.775.736.619,22
3.	Gedung dan Bangunan	46.038.580.595,79	40.497.845.981,44
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.537.243.586,30	1.278.731.086,30
5.	Aset Tetap Lainnya	249.816.250,00	249.816.250,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.273.299.688,09)	(9.503.873.090,85)
Jumlah		51.303.852.603,62	42.499.878.086,51



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Salah satu misi Dinas Perhubungan adalah menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap hal yang dilaksanakan harus dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan maksimal dibidang transportasi adalah suatu keharusan yang perlu dijawab oleh Dinas Perhubungan sebagai sebuah tantangan.

Meningkatkan kualitas pembangunan prasarana, fasilitas dan perizinan dibidang perhubungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya pelayanan angkutan kepada masyarakat luas, penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pendukung transportasi, serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan peningkatan disiplin dan ketertiban pengguna jalan serta pengamanan lalu lintas merupakan bentuk pelayanan yang akan dilakukan secara kontinue dan dievaluasi secara berkala. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang



Perhubungan;

- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;
- f. pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
- h. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
- i. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.3.1. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Kabupaten Sintang memiliki 1 (satu) unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak KM.13 dan telah beroperasi sejak tahun 2012. Pengujian dilaksanakan secara manual dan mekanis. Terdapat 3 buah mesin pengujian kendaraan yang



merupakan bantuan Kementerian Perhubungan RI. Banyaknya kendaraan yang diuji kir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Wajib Uji Kendaraan Bermotor
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mobil penumpang	216	218	216	216	216
2.	Bus	145	146	146	147	147
3.	Mobil barang	2986	3400	3710	3950	4192
4.	Kendaraan khusus	-	-	-	-	-
5.	Kereta gandengan	-	-	-	-	-
6.	Kereta tempelan	-	-	-	-	-
	Total	3347	3764	4072	4313	4555

Banyaknya kendaraan yang lulus uji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Lulus Uji Kendaraan Bermotor
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mobil penumpang	207	175	139	105	77
2.	Bus	14	19	23	16	6
3.	Mobil barang	63	1597	1654	2007	2184
4.	Kendaraan khusus	-	-	-	-	-
5.	Kereta gandengan	-	-	-	-	-
6.	Kereta tempelan	-	-	-	-	-
	Total	284	1791	1816	2128	2267



Terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa uji berkala perpanjangan kendaraan bermotor dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenai biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sintang. Biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tampak dalam tabel berikut:



Tabel 2.8
Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2011-2015
Dishubkomininfo Kabupaten Sintang

Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor						
Jenis Pengujian		Tahun				
Pengujian Awal	satuan	2011	2012	2013	2014	2015
a. JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	71.000	71.000
b. JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	86.000	86.000	86.000	91.000	91.000
c. JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	106.000	106.000	106.000	111.000	111.000
d. JBB > 14.000 kg	Rp.	126.000	126.000	126.000	131.000	131.000
Pengujian Berkala						
a. JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	61.000	61.000	61.000	66.000	66.000
b. JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	86.000	86.000
c. JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	101.000	101.000	101.000	106.000	106.000
d. JBB > 14.000 kg	Rp.	121.000	121.000	121.000	126.000	126.000
Pengujian Penghapusan						
a. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
b. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
c. Kendaraan bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
d. Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Rp.	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000

2.3.2. Pelayanan Pelabuhan Sungai/Bandar Udara/Terminal

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Dermaga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelabuhan.

Bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki



sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya. Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*): Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat".

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang dapat dikelompokkan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

a. Terminal penumpang tipe A

Terminal tipe A atau terminal induk berfungsi melayani kendaraan umum baik secara nasional maupun internasional seperti angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan



b. Terminal penumpang tipe B

Terminal tipe B atau terminal regional berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

c. Terminal penumpang tipe C

Terminal tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Di Kabupaten Sintang terdapat 2 (dua) buah pelabuhan sungai yaitu Pelabuhan Sungai Durian dan Pelabuhan Sungai Ringin, 1 (satu) buah pelabuhan/bandar udara yaitu Bandar Udara Susilo dan 5 (lima) buah terminal yaitu terminal Sungai Durian, terminal Sungai Ukoi, terminal Tanjungpuri, terminal Sepauk dan terminal Nanga Mau.

Tabel 2.9
Jumlah Pelabuhan Sungai/Pelabuhan Udara/Terminal
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelabuhan Sungai	2	2	2	2	2
2.	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3.	Terminal	5	5	5	5	5

Dalam pelaksanaannya, pelabuhan sungai, bandar udara dan terminal melayani arus orang mau pun barang yang tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 2.10
Jumlah Arus Penumpang Umum
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penumpang Angkutan Umum	688.387	666.459	609.292	526.972	526.972

Arus penumpang angkutan umum memiliki trend menurun setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, kerusakan jalan yang semakin meningkat dan pengaruh cuaca yaitu seringnya terjadi banjir pada jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat.

Untuk melayani masyarakat dalam hal penyediaan angkutan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyediakan kendaraan angkutan umum namun harus memiliki ijin trayek dari pemerintah. Jumlah trayek yang ada di Kabupaten Sintang seperti tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Trayek Angkutan Umum
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah trayek	Trayek	57	62	62	72	73



Secara rinci terdapat dalam tabel berikut:

ANGKUTAN DALAM KOTA

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1	TERMINAL SEI. DURIAN – TANJUNG PURI	22	9	198
2	TERMINAL SEI. DURIAN – BANING	10	9	90
3	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. PUTIH	4	9	36
4	TERMINAL TJ. PURI – TERMINAL SEI. DURIAN	4	9	36
5	TERMINAL TJ. PURI – BANING	12	9	108
6	TERMINAL TJ. PURI – JERORA	5	9	45
7	TERMINAL TJ. PURI – KP. LADANG	4	9	36
8	TERMINAL TJ. PURI – MENYURAI	4	9	36
9	TERMINAL TJ. PURI – SESAR	3	9	27
10	TERMINAL TJ. PURI – MUSEUM	1	9	9
11	TERMINAL TJ. PURI – SEI. KAWAT	1	9	9
	Jumlah	70	99	630

ANGKUTAN PEDESAAN

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Sungai Durian :</u>			
1	TERMINAL SEI. DURIAN – SUNGAI UKOI	21	9	189
2	TERMINAL SEI. DURIAN – PANDAN	19	9	171
3	TERMINAL SEI. DURIAN – DEDAI	11	9	99
4	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.I	17	9	153
5	TERMINAL SEI. DURIAN – BELOYANG	4	9	36
6	TERMINAL SEI. DURIAN – BAYA BETUNG	1	9	9
7	TERMINAL SEI. DURIAN – GURNG	2	9	18
8	TERMINAL SEI. DURIAN – BANCOH	2	9	18
9	TERMINAL SEI. DURIAN – LAMAN BUKIT	3	9	27
10	TERMINAL SEI. DURIAN – KAJANG	2	9	18
11	TERMINAL SEI. DURIAN – GURUNG MALI	2	9	18
12	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. KURA	7	9	63
13	TERMINAL SEI. DURIAN – TEMPUNAK	9	9	81
14	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.C / PAOH	13	9	117
15	TERMINAL SEI. DURIAN – SEPAUK	12	9	108
16	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP. H	8	9	72
17	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. AYAK	2	9	18
18	TERMINAL SEI. DURIAN – MANSIK	4	9	36
19	TERMINAL SEI. DURIAN – MENSIKU	5	9	45
20	TERMINAL SEI. DURIAN – TELAGA	8	9	72
21	TERMINAL SEI. DURIAN – KELANSAM	7	9	63
22	TERMINAL SEI. DURIAN – BAUNG	5	9	45
23	TERMINAL SEI. DURIAN – SEJIRAK	1	9	9
24	TERMINAL SEI. DURIAN – TUMBUK	1	9	9



25	TERMINAL SEI. DURIAN – PEDADANG	2	9	18
26	TERMINAL SEI. DURIAN – SEMUBUK	1	9	9
27	TERMINAL SEI. DURIAN – SERANGAS	3	9	27
28	TERMINAL SEI. DURIAN – SEGANTONG	1	9	9
29	TERMINAL SEI. DURIAN – MANGKOK MATAI	1	9	9
30	TERMINAL SEI. DURIAN – BALAI SEPUAK	1	9	9
31	TERMINAL SEI. DURIAN – GANDIS HILIR	1	9	9
32	TERMINAL SEI. DURIAN – KEDERAS	1	9	9
	Jumlah	177	288	1593

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1	SINTANG – SERAWAI	5	25	125
2	SINTANG – NANGA KETUNGAU	0	25	0
3	SINTANG – MERAKAI	3	25	75
4	SINTANG – SENANING	1	25	25
	Jumlah	9	100	225

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Tanjung Puri :</u>			
1	TERMINAL TANJUNG PURI – SEI. UKOI	4	9	36
2	TERMINAL TANJUNG PURI – L. KELAM	7	9	63
3	TERMINAL TANJUNG PURI – EMPACI	5	9	45
4	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G 123	6	9	54
5	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G 456	3	9	27
6	TERMINAL TANJUNG PURI – JETAK	7	9	63
7	TERMINAL TANJUNG PURI – PENGKADAN	3	9	27
8	TERMINAL TANJUNG PURI – DEDAI	4	9	36
9	TERMINAL TANJUNG PURI – BULUH MERINDU	6	9	54
10	TERMINAL TANJUNG PURI – BARAS UMIN	6	9	54
11	TERMINAL TANJUNG PURI – GANDIS	3	9	27
12	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. 7.8 BENGKUANG	3	9	27
13	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TIKAN	5	9	45
14	TERMINAL TANJUNG PURI – MEKINGKAT	3	9	27
15	TERMINAL TANJUNG PURI – LINGGAM IPOH	1	9	9
16	TERMINAL TANJUNG PURI – TUGUG	1	9	9
17	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA MAU	6	16	96
18	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TEBIDAH	5	25	125
19	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. SILAT	4	9	36
20	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G SP. 1.2.3	1	9	9
	Jumlah	83	203	869



AKDP

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	SINTANG – PONTIANAK			
	1. PRIM.642 KAPUAS	4	40	160
	2. CV. ARYO	3	40	120
2.	SINTANG – PUTUSSIBAU			
	CV. INDAH UTAMA	2	25	50
3.	SINTANG – NANGA PINOH			
	PT. DUTA	4	16	64
4.	SINTANG – BONGKONG			
	CV. INDAH UTAMA	2	16	32
5.	SINTANG – JONGKONG			
	1. CV. ASRI	2	25	50
6.	SINTANG – SUHAID			
	1. CV. INDAH UTAMA	4	16	64
	Jumlah	21	178	540

JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	ANGKUTAN DALAM KOTA	70	99	630
2.	ANGKUTAN PEDESAAN	269	591	2687
3.	AKDP	21	178	540
	Jumlah	360	868	3857

2.3.3. Keselamatan Lalu Lintas

Dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.



Kebutuhan rambu lalu lintas di Kabupaten Sintang adalah 1999 unit. Rasio pemasangan rambu lalu lintas tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.12
Rasio Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	26,11	30,32	35	-	44,27

Terdapat kenaikan rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tiap tahunnya, sebanding dengan pendanaan yang tersedia. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat yang nilainya cenderung meningkat tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2015 telah terpasang 885 unit rambu-rambu lalu lintas.

2.3.4. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011-2015

Capaian pembangunan perhubungan selama tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2011-2015, meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, udara, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, dengan hasil capaian sebagai berikut:



1.1.1. Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana

a. Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, rehabilitasi fasilitas terminal, pembangunan ATCS, dan pembangunan halte, pembangunan dan penataan tempat parkir serta peningkatan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	terminal	-	-	-	1	4
2	Pembangunan Gedung Terminal	unit	-	-	-	-	-
3	Pembangunan/Pemeliharaan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	unit	1	2	2	3	13
4	Penataan Lokasi Parkir	lokasi	-	-	-	-	3
5	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	unit	72	84	91	-	188
6	Pengadaan Marka Jalan	m ²	2820	-	-	576	180
7	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	m	68	72	134	-	110
8	Pengadaan ATCS	unit	-	-	1	-	-
9	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PKB	unit	-	-	-	-	1



b. Transportasi Sungai

Capaian pembangunan transportasi sungai selama tahun 2011-2015 dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan, pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan dan pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai
Tahun 2011-2015
Dishubkominformo Kabupaten Sintang

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	sungai	-	14	2	2	-
2	Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	unit	1	47	137	78	10
3	Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Dermaga / Pelabuhan	unit	-	-	-	2	-
4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	unit	20	-	-	-	-

c. Transportasi Udara

Untuk memberikan pelayanan transportasi yang cepat dan mudah, dilaksanakan pembangunan bandara udara Tebelian. Capaian pembangunan transportasi udara selama tahun 2011-2015 sebagai berikut:



Tabel 2.15
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara
Tahun 2011-2015s
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan Fasilitas Bandara Tebelian Sisi Darat	paket	-	-	-	1	1

d. Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kurun waktu 2011-2015 Dinas Perhubungan telah menyelesaikan beberapa peraturan perundangan yang berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur beberapa substansi pekerjaan. Rincian capaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

Capaian	Pencapaian					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan, dalam bentuk:						
1. Peraturan Bupati		1	1	7	1	10
2. Keputusan Kepala Dinas	11	15	13	16	16	71

e. Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ditujukan untuk mewujudkan struktur organisasi yang terbebas dari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi



maupun kewenangan di dalam organisasi maupun antar instansi serta terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efektif dan efisien. Hasil capaian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penerbitan Peraturan Bupati sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Jumlah Penataan (berupa Peraturan Bupati)
1	2011	-
2	2012	-
3	2013	-
4	2014	1
5	2015	-

f. Capaian Kinerja Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2015 sebanyak 60 orang, dengan komposisi pegawai terdiri dari Sekretariat sebanyak 15 orang, bidang perhubungan darat 21 orang, bidang perhubungan sungai 10 orang, bidang sarana dan prasarana 7 orang, bidang kominfo 7 orang.

Dalam jangka waktu tahun 2011-2015 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi



pembangunan bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada kurun waktu 2011-2015 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal, yang dicapai melalui pelaksanaan program:
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan bermotor
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah yang dicapai melalui pelaksanaan program:
 - a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck*



kapasitas infrastruktur transportasi yang dicapai melalui pelaksanaan program:

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi yang dicapai melalui pelaksanaan program:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi sasaran tersebut diatas dapat diukur melalui capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.18
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011-2015

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK/IKU	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten	75,00	100,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	20,61	21,20	22,16	13,09	9,44	27,48	28,27	29,55	17,45	12,59
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten.	100,00	100,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	33,33	33,33	50,00	50,00	50,00
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100,00	100,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	87,50	92,50	100,00	107,50	112,50	145,83	154,17	166,67	179,17	187,50
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100,00	100,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00



5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.	60,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	17,90	22,82	19,53	16,75	37,83	22,38	28,53	24,41	20,94	47,29
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60,00	90,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal.	50,00	90,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100,00	100,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	53,33	80,00	80,00	80,00	80,00
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten.	40,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	53,33	53,33	53,33	53,33	60,00	133,33	133,33	133,33	133,33	150,00
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	25,00	25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.	100,00	100,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00					60,00	-	-	-	-	80,00
12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	61,00	64,00	23,33	4,67	50,00	122,00	128,00	46,66	9,34	100,00
13	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	50,00	50,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	80,00	67,00		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	99,51	99,51	99,51	99,51	99,51
15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.	100,00	100,00		-	-	-	-	-					50,00	-	-	-	-	-



16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					30,00	-	-	-	-	60,00
17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten.																		
18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten.																		
19	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.																		



20	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten																	
21	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.																	
22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.																	
23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.																	



24	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.																	
25	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.																	
26	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT																	



2.3.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan selama tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Realisasi penyerapan anggaran sudah relatif besar, walaupun tidak seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap, yang berakibat hilangnya manfaat belanja. Rata-rata penyerapan anggaran rendah diawal tahun, karena bidang berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya. Besarnya alokasi anggaran dan penyerapannya lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	2011	5.163.141.602,00	4.924.689.381,00	95,38
2.	2012	10.979.138.245,00	9.997.946.238,00	91,06
3.	2013	16.584.736.824,00	15.149.351.906,00	91,35
4.	2014	17.770.776.197,00	17.517.036.246,00	98,57
5.	2015	14.372.448.854,00	13.147.791.161,00	91,48
Jumlah		64.870.241.722,00	60.736.814.932,00	93,63

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Objek pendapatan daerah dari sektor perhubungan adalah retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi kepelabuhanan dan retribusi izin trayek. Terdapat trend kenaikan target dan realisasi setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.20
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011-2015
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	2011	296.745.500,00	200.713.300,00	67,64
2.	2012	432.867.100,00	336.715.000,00	77,79
3.	2013	629.231.000,00	417.136.000,00	66,29
4.	2014	640.280.000,00	504.047.500,00	78,72
5.	2015	630.329.500,00	470.052.500,00	74,57
Jumlah		2.629.453.100,00	1.928.664.300,00	73,35

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memerlukan anggaran yang digunakan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang yang diberikan kepadanya. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2011-2015 sesuai dengan program yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 2.21
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011-2015

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
I.	URUSAN / BIDANG PERHUBUNGAN																	
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	75.484.000	145.414.000	34.152.300	217.580.000	199.470.130	75.002.000	142.506.400	32.424.300	216.225.000	198.032.130	99,36	98,00	94,94	99,38	99,28	12,43	32,81
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	-	580.241.750	107.570.000	426.680.000	109.970.000	-	574.448.000	103.707.000	424.970.000	107.773.000	0,00	99,00	96,41	99,60	98,00	20,00	-16,25
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	184.069.500	247.021.500	149.789.700	187.495.800	284.520.600	183.567.500	224.153.300	146.590.700	182.436.038	254.559.884	99,73	90,74	97,86	97,30	89,47	7,06	7,73
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	141.320.000	4.198.272.000	10.328.352.200	10.456.861.500	5.994.211.104	140.720.000	3.870.649.000	9.131.536.347	10.423.861.450	5.990.856.104	99,58	92,20	88,41	99,68	99,94	19,53	831,46
5.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	399.433.000	629.247.000	675.468.800	728.213.000	648.344.230	396.077.000	614.701.700	666.808.680	717.909.000	634.853.825	99,16	97,69	98,72	98,59	97,92	7,68	12,06
6.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	-	500.000.000	398.121.349	-	101.790.000	-	493.374.500	381.817.500	-	101.070.000	0,00	98,67	95,90	0,00	99,29	20,00	0,00
II.	URUSAN/BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00	338.480.305	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	0,00
2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	77.693.825	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587.500	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perhubungan

2.4.1.1. Tantangan Pelayanan Perhubungan

1. Kabupaten Sintang merupakan daerah dengan kondisi geografis cukup berat, luas jangkauannya dan kondisi jalan dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian besar permukaan berupa jalan tanah. Selain itu daya dukung jalan rendah dan rentang akses jalan darat yang masih pendek mengakibatkan pelayanan bidang perhubungan tidak maksimal.
2. Tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi masih kurang dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, lancar, murah dan murah.
3. Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal disebabkan keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparaturnya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
4. Berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam bidang perhubungan belum dapat dilaksanakan karena terbentur dasar hukum pelaksanaannya.



5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi sehingga jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang maksimal.

2.4.1.2. Peluang Pelayanan Perhubungan

1. Misi pemerintah daerah yang akan mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
2. Dukungan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan keamanan dari Pemerintah Pusat dapat mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
3. Akses ke daerah pelosok yang semakin terbuka dengan adanya kebijakan pimpinan daerah untuk membangun dari desa ke kota.
4. Adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
5. Adanya potensi retribusi yang belum tergali dengan maksimal seperti kepelabuhanan, perparkiran.
6. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak dengan semakin mudahnya



untuk mengakses informasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan. Namun hal tersebut berjalan searah dengan permasalahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya tujuan dalam rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal.
3. Jumlah angkutan umum di kota Sintang semakin berkurang karena berkurangnya minat pengguna angkutan umum dan menjamurnya kendaraan pribadi.
4. Lemahnya data base berkaitan dengan kebutuhan dan data mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka dan guardraill serta fasilitas lain seperti traffic light dan CCTV.
5. Personil / SDM yang dimiliki masih belum memiliki kompetensi khusus yang berkaitan dengan bidang



- terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRLL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
6. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan sarana prasarana perhubungan yang sudah tersedia untuk menggali potensi pendapatan daerah.
 7. Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran.
 8. Terbatasnya alokasi pagu anggaran Dinas Perhubungan menyulitkan proses penganggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kabupaten Sintang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang, serta sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Maka berdasarkan hal tersebut, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Visi pembangunan tersebut adalah :



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

Penjelasan dari Visi ini sebagai berikut:

- a. Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasankedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- b. Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
- c. Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.
- d. Religius adalah keadaan dimana masyarakatmenghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.
- e. Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata.
- f. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam



penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab.

3.2.2. Misi Kabupaten Sintang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi yang merupakan penjabaran dari visi. Misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.3. Program Pembangunan Kabupaten Sintang

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 telah menetapkan visi dan misi untuk



menuntun arah pembangunan kearah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang maka Dinas Perhubungan melaksanakan misi ketiga yaitu **“Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah”**.

Misi ketiga ini diterjemahkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju yaitu suatu keadaan dimana kebutuhan masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah kabupaten Sintang, ditetapkanlah program-program jangka menengah yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 2016-2021. Secara lebih jelas digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1
Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang
Tahun 2016-2021
Dishubkominfo Kabupaten Sintang

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa	1. Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
				2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
				3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
				4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
				5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
				6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu:

**“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal,
Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**

Penjelasan Visi ini adalah:

- a. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan



- masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- c. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Kementerian Perhubungan yaitu :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Visi dan Misi Presiden dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional transportasi yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi



antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global.
3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi.
4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) disektor transportasi.
5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya.
6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan.
8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu keselamatan dan keamanan; pelayanan transportasi; dan kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian



Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun target kinerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah:

1. Keselamatan dan keamanan transportasi
2. Pelayanan transportasi
3. Kapasitas transportasi

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Tertib, Teratur, Selamat, Aman, Nyaman dan Harga Yang Wajar ”.

Agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan dengan harapan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi tersebut dituangkan kedalam Misi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi, Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi, Komunikasi dan Informatika yang berdisiplin.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak di bidang Kominfo, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatkan SDM di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Sintang disusun dengan mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, serta dilengkapi dengan konsep sistem pusat kegiatan untuk Kabupaten Sintang. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sintang merupakan simul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) terdapat di desa Jasa kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di kota Sintang yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan kabupaten sekitar. PKW adalah kota/kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan lebih tinggi dan diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan tingkat kabupaten dan beberapa kabupaten sekitarnya.
3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdapat di Nanga merakai, Nanga Sepauk dan Nanga Serawai. Penetapan PKL didasari oleh pertimbangan perlunya pusat-pusat permukiman yang tersebar secara proporsional di dalam ruang.
4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdapat di 10 ibukota kecamatan lainnya yaitu Senaning, Nanga Ketungau,



Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Nanga Dedai, Kebong, Nanga mau, Nanga Tebidah dan nanga Kemangai. PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Sintang secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu rencana penetapan fungsi jaringan transportasi, rencana pembangunan prasarana transportasi, dan rencana pengembangan sistem angkutan umum. Pengembangan sistem transportasi ini terutama sistem transportasi darat memiliki fungsi ganda yaitu untuk melayani perkembangan kota yang terjadi saat ini dan merangsang perkembangan kota kearah yang diinginkan dalam rencana peruntukan lahan.

Dalam konteks regional, pengembangan sistem transportasi diarahkan dengan fungsi yang telah ditetapkan baik sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari dan ke wilayah kecamatan maupun sebagai pusat komunikasi. Sedangkan dalam konteks internal kota, pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kesemerawutan lalu lintas akibat bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal, melalui pengaturan sistem sirkulasi dan pengaturan fungsi hirarkis jaringan transportasinya. Hal ini penting dilakukan mengingat sistem



transportasi memiliki pengaruh yang besar dalam tingkat efektifitas dan efisiensi interaksi kegiatan-kegiatan kota.

Disamping itu, pengembangan sistem transportasi juga diarahkan pada pembentukan suatu sistem pergerakan lokal dan regional yang serasi dan terpadu dalam satu sistem transportasi darat dan sungai..

Rencana pengembangan sistem transportasi darat terutama diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Penentuan fungsi hirarkis sistem jaringan jalan.
2. Peingkatan fungsi jalan yang sudah ada sesuai dengan fungsi yang ditetapkan kembali untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian desain teknis badan jalan sesuai fungsinya.
3. Pembangunan jalan-jalan baru dan jembatan sesuai dengan pola peruntukan lahan.
4. Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana transportasi yang meliputi termnal dan moda angkutan umum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, salah satu tujuan diselenggarakannya transportasi jalan adalah untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi



martabat bangsa. Dalam pengembangan jaringan pelayanan di dalam Kabupaten Sintang ini untuk mendukung pembangunan simpul-simpul baru seperti bandar udara di kecamatan Tebelian, pengembangan terminal angkutan penumpang dimasing-masing kecamatan, perlu dikembangkan suatu pelayanan angkutan yang saling terkoneksi antar simpul tersebut dengan jenis moda berupa bus besar, sedang dan mobil angkutan penumpang.

Dalam penataan angkutan umum pedesaan kabupaten Sintang perlu diketahui koridor-koridor kantong penumpang untuk melihat permintaan yang ada serta melihat rencana sistem perkotaan di masing-masing kecamatan karena diperlukan adanya konektivitas antara pusat kota Sintang dengan beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Sintang untuk mendukung aksesibilitas dan mobilisasi yang digunakan oleh penduduk. Yang perlu dilakukan adalah penyediaan angkutan umum bagi daerah PPK dan PPL. Kemudian juga akan dikembangkan model pelayanan yang terjadwal dan melakukan peremajaan terhadap angkutan umum pedesaan.

Pengembangan jaringan prasarana dilakukan dengan:

1. Optimalisasi terminal tipe B yaitu terminal Sungai Durian untuk mewujudkan lalu lintas yang lancar, aman, nyaman, tertib, selamat dan berwawasan lingkungan. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, memperbaiki fasilitas tempat tunggu penumpang dan memasang rambu-rambu dan papan



informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

2. Optimalisasi terminal tipe C yaitu terminal Tanjungpuri. Terminal ini melayani angkutan perkotaan dan perdesaan. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kondisi terminal, membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, membuat fasilitas parkir dan memasang rambu-rambu dan papan informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan wilayah, maka sistem prasarana yang perlu dikembangkan adalah sarana prasarana darat dan sungai. Karena wilayah Kabupaten Sintang terdapat banyak sungai yang dapat dilayari antara lain sungai Kapuas, sungai Melawi dan sungai Ketungau sehingga transportasi sungai ini mempunyai peran yang cukup besar dalam sistem transportasi di Kabupaten Sintang. pengembangan transportasi sungai terutama dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dapat dilalui oleh jalan darat. Sehubungan dengan itu, arah pengembangannya adalah pengembangan armada yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang cukup baik dan pengamanan kawasan sepanjang sungai dari pangkalan dan buangan ranting kayu.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika yang berkembang. Isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan, sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan.

Adapun Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan faktor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah:

3.5.1. Kekuatan Dinas Perhubungan

1. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat dan sebagainya.
2. Adanya visi dan misi yang dapat mengarahkan tujuan pembangunan kepada perwujudan cita-cita yang telah ditetapkan.
3. Kuantitas SDM yang dapat mendukung proses pelaksanaan program/kegiatan.



4. Sarana dan prasarana pendukung untuk mempermudah dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sedikit demi sedikit ditingkatkan.

3.5.2. Kelemahan Dinas Perhubungan

1. Keterbatasan kompetensi SDM terutama yang berlatar belakang teknis, kuantitas yang tidak didukung dengan kualitas akan menghambat kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat atau beasiswa pendidikan formal. Selain itu perlu diusulkan untuk ditempatkan personil yang berkualitas dan memiliki visi untuk bekerja untuk kemajuan SKPD.
2. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan dibidang Perhubungan. Pelayanan dibidang Perhubungan, memerlukan penyediaan dana yang memadai baik dari APBD maupun APBN sehingga fungsi pelayanan dapat berjalan dengan semestinya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING		
MISI 1	TUJUAN	SASARAN
Melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, tepat guna, dapat melayani seluruh wilayah dan mencukupi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas 2. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang tepat guna 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur transportasi mencakup darat, sungai dan udara
MISI 2	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	1. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi 2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai 3. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang



MISI 3	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik



4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif memang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan yang telah ditetapkan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi Renstra tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA DISHUB TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING			
Misi 1 : Melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, tepat guna, dapat melayani seluruh wilayah dan mencukupi kebutuhan masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1. Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas 2. Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang tepat guna 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur transportasi mencakup darat, sungai dan udara	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastuktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang mencakup darat, sungai, udara dalam rangka mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
Misi 2 : Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	1. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi 2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai 3. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	Strategi yang berorientasi pada peningkatan keselamatan dan keamanan bertransportasi	1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dan sungai 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi 3. Peningkatan layanan perijinan kendaraan darat maupun sungai
Misi 3 : Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan SDM	1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk menghasilkan aparatur yang handal dan profesional



Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:



Tabel 4.3.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	- Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas	- Terminal angkutan darat yang meningkat fungsinya	90	90	95	95	100
		- Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang tepat guna	- Jumlah terminal /pelabuhan / balai pengujian kendaraan bermotor / fasilitas perlengkapan jalan / alur pelayaran sungai yang terpelihara	100	100	100	100	100
		- Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur transportasi mencakup darat, sungai dan udara	- Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan	60	65	70	75	80
2.	Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	- Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi	- Terlaksananya pengawasan, pelayanan administrasi, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan dermaga	100	100	100	100	100



		- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai - Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	- Tingkat ketertiban arus lalu lintas, keamanan dan kelancaran serta terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	90	90	95	95	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan SDM	- Meningkatkan kualitas pelayanan dan tersedianya SDM yang handal dan profesional untuk memberikan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik	- Tingkat pelayanan administrasi perkantoran - Tingkat penyediaan sarana dan prasarana aparatur - Tingkat kedisiplinan aparatur - Tingkat kapasitas sumber daya aparatur - Tingkat ketertiban administrasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM 2016 - 2021

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, terdiri dari 5 (lima) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 9 (sembilan) Program Pokok Pembangunan. Adapun program-program tersebut sebagaimana berikut :

Program Rutin Administrasi Perkantoran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pokok Pembangunan :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



-
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.



**MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SINTANG**

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL 2016											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
								2017		2018		2019		2020		2021			
1					2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	07	01			PERHUBUNGAN														
1	07	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terperuhnya / tersedianya fasilitas kantor sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran													
1	07	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi Rp. 3.000,00 Jumlah materi Rp. 6.000,00 Jumlah paket/pengiriman Buku cek	4 jenis	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.170.000,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.487.000,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.835.700,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	4.219.270,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	4.641.197,00	1900 lembar 300 lembar 50 kg 30 buah	Dishub
1	07	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa telepon Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian jasa internet	3 jenis	12 bulan 12 bulan 12 bulan	124.680.000,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	137.148.000,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	150.862.800,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	165.949.080,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	182.543.988,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dishub
1	07	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah KIR kendaraan roda 4 Jumlah KIR kendaraan roda 6 Jumlah pajak kendaraan roda 2 Jumlah pajak kendaraan roda 4 Jumlah pajak kendaraan roda 6	24 unit	2 unit 2 unit 14 unit 4 unit 2 unit	14.578.000,00	2 unit 2 unit 15 unit 5 unit 2 unit	16.035.800,00	2 unit 2 unit 16 unit 5 unit 2 unit	17.639.380,00	2 unit 2 unit 17 unit 5 unit 2 unit	19.403.318,00	2 unit 2 unit 18 unit 5 unit 2 unit	21.343.649,80	2 unit 2 unit 18 unit 5 unit 2 unit	Dishub
1	07	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih Jumlah tenaga kebersihan Jumlah ATK	25 jenis 5 orang 40 jenis	25 jenis 5 orang 40 jenis	66.918.200,00	25 jenis 5 orang 40 jenis	68.925.746,00	25 jenis 5 orang 40 jenis	70.993.518,38	25 jenis 5 orang 40 jenis	73.123.323,93	25 jenis 5 orang 40 jenis	75.317.023,65	25 jenis 5 orang 40 jenis	Dishub
1	07	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah perlengkapan komputer lainnya	5 jenis	4 jenis	55.445.500,00	4 jenis	57.108.865,00	4 jenis	58.822.130,95	4 jenis	60.586.794,88	4 jenis	62.404.398,72	4 jenis	Dishub
1	07	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	19 jenis 20000 lembar	19 jenis 20000 lembar	47.319.075,00	19 jenis 20000 lembar	52.050.982,50	19 jenis 20000 lembar	57.256.080,75	19 jenis 20000 lembar	62.981.688,83	19 jenis 20000 lembar	69.279.857,71	19 jenis 20000 lembar	Dishub
1	07	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 jenis	10 jenis	6.480.000,00	12 jenis	7.128.000,00	12 jenis	7.840.800,00	12 jenis	8.624.880,00	12 jenis	9.487.368,00	12 jenis	Dishub
1	07	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	3 jenis	4 jenis	4.020.000,00	3 jenis	4.422.000,00	3 jenis	4.864.200,00	3 jenis	5.350.620,00	4 jenis	5.885.682,00	4 jenis	Dishub
1	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan Jumlah snack	915 bungkus 915 kotak	1020 bungkus 1020 kotak	35.700.000,00	1 bungkus 1 kotak	39.270.000,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	43.197.000,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	47.516.700,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	52.268.370,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	Dishub



1	07	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi konsultasi dalam daerah provinsi	39 kali	18 kali	298.395.000,00	35 kali	328.234.500,00	35 kali	361.057.950,00	35 kali	397.163.745,00	35 kali	436.880.119,50	35 kali	Dishub
						Jumlah rapat koordinasi konsultasi luar daerah provinsi	60 kali	18 kali		25 kali		25 kali		25 kali		25 kali		25 kali	
1	07	01	01	28	Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan Pekan Raya Sintang	1 kegiatan	1 kegiatan	25.250.000,00	1 kegiatan	27.775.000,00	1 kegiatan	30.552.500,00	1 kegiatan	33.607.750,00	1 kegiatan	36.968.525,00	1 kegiatan	Dishub
						Jumlah kegiatan Pawai Pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
1	07	01	01	36	Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah pembinaan ke dalam daerah	28 kali	13 kali	52.840.000,00	21 kali	58.124.000,00	21 kali	63.936.400,00	21 kali	70.330.040,00	21 kali	77.363.044,00	21 kali	Dishub
1	07	01	01	44	Jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	Jumlah tenaga teknis lapangan	6 orang	6 orang	225.827.400,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	Dishub
						Jumlah tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang	
						Jumlah tenaga sopir/motoris	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang	
1	07	01	01	47	Penyediaan bahan bakar minyak	Jumlah BBM kendaraan operasional	5320 liter	5551 liter	65.202.160,00	6158 liter	71.722.376,00	6.773 liter	78.894.613,60	6.773 liter	86.784.074,96	6.773 liter	90.000.000,00	6.773 liter	Dishub
						Jumlah BBM mesin PKB	480 liter	480 liter		480 liter									
1	07	01	01	58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan	Jumlah monitoring yang terlaksana	25 kali	18 kali	57.329.110,00	20 kali	70.700.000,00	22 kali	75.000.000,00	25 kali	75.000.000,00	25 kali	75.000.000,00	25 kali	Dishub
1	07	01	01	90	Peresmian Bandar Udara Tebelan	Jumlah kegiatan peresmian Bandara Tebelan	-	1 kegiatan	100.038.000,00									1 kegiatan	Dishub
1	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran													
1	07	01	02	03	Pengadaan bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor Dishubkominfo yang tersedia	1 unit			1 unit	4.000.000.000,00								
1	07	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	24 unit			2 unit	280.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	Dishubkominfo
1	07	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bendera yang tersedia	21 buah	15 buah	8.875.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	Dishub
						Jumlah spanduk yang tersedia	140 meter	140 meter		140 meter		140 meter		140 meter		140 meter		140 meter	
1	07	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 jenis	2 jenis	8.400.000,00	4 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	27.500.000,00	5 jenis	Dishub
1	07	01	02	10	Pengadaan mebelair	Jumlah mebelair	3 jenis	3 jenis	13.200.000,00	3 jenis	16.000.000,00	3 jenis	17.600.000,00	3 jenis	19.360.000,00	3 jenis	21.296.000,00	3 jenis	Dishub
1	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung kantor	200 m2			m2	-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	Dishub
1	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2	14 unit	14 unit	82.960.000,00	15 unit	91.256.000,00	16 unit	100.381.600,00	17 unit	110.419.760,00	14 unit	121.461.736,00	14 unit	Dishub
						Jumlah kendaraan roda 4	4 unit	4 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	
						Jumlah kendaraan roda 6	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	
1	07	01	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	3 jenis	19 unit	14.040.000,00	8 jenis	15.444.000,00	8 jenis	16.988.400,00	8 jenis	18.687.240,00	8 jenis	20.555.964,00	8 jenis	Dishub
1	07	01	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala lingkungan kantor	Jumlah luas lingkungan kantor	400m2												
1	07	01	02	56	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	1 unit	11.300.000,00	1 unit	12.430.000,00	1 unit	13.673.000,00	1 unit	15.040.300,00	1 unit	16.544.330,00	1 unit	Dishub
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	
						Jumlah printer	15 unit	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	
1	07	01	02	58	Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	24 unit	21.500.000,00	25 unit	23.650.000,00	26 unit	26.015.000,00	27 unit	28.616.500,00	28 unit	31.478.150,00	28 unit	Dishub
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	19 unit		20 unit		21 unit		22 unit		23 unit		23 unit	



1	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dishub	
1	07	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	75 stel		75 stel	58.000.000,00	75 stel	58.000.000,00	75 stel	60.000.000,00	75 stel		60.000.000,00	75 stel	Dishub	
1	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengikutsertakan personil Dishubkominfo dalam pelatihan atau diklat teknis maupun fungsional sehingga terpenuhinya tenaga teknis maupun fungsional yang handal pada bidang tugasnya masing-masing														
1	07	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	10 ASN	2 orang	52.030.000,00	8 orang	57.233.000,00	10 orang	62.956.300,00	12 orang	69.251.930,00	14 orang		76.177.123,00	14 orang	Dishub
1	07	01	06		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah, tersusunnya prognosis realisasi anggaran serta tersusunnya laporan keuangan akhir tahun														
1	07	01	06	02	Penyusunan pelaporan semesteran realisasi anggaran	Jumlah laporan semester dan prognosis	1 dokumen	1 dokumen	1.472.500,00	1 dokumen	1.619.750,00	1 dokumen	1.781.725,00	1 dokumen	1.959.897,50	1 dokumen		2.155.887,25	1 dokumen	Dishub
1	07	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	2.585.000,00	1 dokumen	2.843.500,00	1 dokumen	3.127.850,00	1 dokumen	3.440.635,00	1 dokumen		3.784.698,50	1 dokumen	Dishub
1	07	01	06	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Tahunan	1 dokumen	1 dokumen	2.282.000,00	1 dokumen	2.510.200,00	1 dokumen	2.761.220,00	1 dokumen	3.037.342,00	1 dokumen		3.341.076,20	1 dokumen	Dishub
1	07	01	06	16	Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra	-								1 dokumen		5.000.000,00	1 dokumen	Dishub	
1	07	01	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan, standar dan prosedur serta kebijakan dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan													Dishub	
					Perencanaan demaga Sungai Ringin	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	-		1 dokumen	100.000.000,00									Dishub	
					Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal darat yang ditingkatkan	4 terminal	2 terminal	100.000.000,00	2 terminal	100.000.000,00	2 terminal	100.000.000,00						Dishub	
1	07	01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor, fasilitas perlengkapan jalan, balai pengujian kendaraan bermotor serta terminal dan pelabuhan														
1	07	01	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/demaga/alur pelayaran sungai yang terpelihara	4 alur sungai	3 alur sungai	300.710.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai		200.000.000,00	2 alur sungai	Dishub
1	07	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya pengawasan, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan demaga														
1	07	01	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum	Tertib administrasi kendaraan angkutan umum	1 kegiatan	3 kali	7.530.000,00	24 kali	50.000.000,00	24 kali	50.000.000,00	24 kali	55.000.000,00	36 kali		70.000.000,00	36 kali	Dishub
1	07	01	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan pada hari raya idul fitri, natal dan tahun baru	1 kegiatan	2 kegiatan	24.570.000,00	3 kegiatan	55.000.000,00	3 kegiatan	55.000.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00	3 kegiatan		65.000.000,00	3 kegiatan	Dishub
1	07	01	17	10	Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya pelayanan administrasi kapal di tempat	1 kegiatan	3 kecamatan	51.109.360,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan		100.000.000,00	13 kecamatan	Dishub
1	07	01	17	13	Fasilitasi perjinan di bidang perhubungan	Tersedianya bahan kelengkapan administrasi dan kelayakan pelayanan angkutan	1 kegiatan	1 tahun	11.290.000,00	1 tahun	27.500.000,00	1 tahun	30.000.000,00	1 tahun	33.000.000,00	1 tahun		35.000.000,00	1 tahun	Dishub
1	07	01	17	14	Sosialisai/penyuluhan keterbacaan lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan keterbacaan lalu lintas dan angkutan	1 kegiatan	1 kecamatan	3.795.000,00	36 kali	25.000.000,00	36 kali	27.000.000,00	36 kali	27.000.000,00	36 kali		30.000.000,00	36 kali	Dishub
1	07	01	17	15	Kegiatan pembinaan sopir/urug mudlak kendaraan angkutan umum teladan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengemudi kendaraan akan keselamatan berlalu lintas	1 kegiatan	20 orang	18.679.500,00	20 orang	35.000.000,00	20 orang	35.000.000,00	20 orang	40.000.000,00	20 orang		40.000.000,00	20 orang	Dishub



1	07	01	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data bahan evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan pelayanan angkutan	1 kegiatan	2 kali	2.020.000,00	5 kecamatan	15.000.000,00	5 kecamatan	17.000.000,00	5 kecamatan	20.000.000,00	5 kecamatan	25.000.000,00	5 kecamatan	Dishub
1	07	01	17	19	Kegiatan pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pelajar akan keselamatan berlalu lintas	1 kegiatan	25 orang	27.879.500,00	25 orang	30.667.450,00	25 orang	33.734.195,00	25 orang	37.107.614,50	20 orang	40.818.375,95	20 orang	Dishub
1	07	01	17	24	Pendataan dan pengelompokan kapal angkutan sungai	Jumlah kecamatan yang terdapat kapal angkutan sungai													
1	07	01	17	25	Kegiatan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	Terlaksananya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	1 kegiatan	1 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	17	26	Survey, penetapan jaringan trayek angkutan sungai	Jumlah dokumen jaringan trayek angkutan sungai yang dihasilkan	-												Dishub
1	07	01	17	27	Kegiatan pengamanan dan ketertiban di demaga/pelabuhan	Terciptanya keamanan dan ketertiban penumpang angkutan umum di demaga/pelabuhan pada hari raya Idul Fitri dan Natal	-	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	17	32	Kegiatan pengumpulan dan analisis data kepelabuhanan	Tersedianya data kepelabuhanan	-			1 kegiatan	35.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan													
1	07	01	18	01	Pembangunan gedung terminal	Jumlah terminal yang dibangun	5 terminal									1 terminal	2.000.000.000,00	1 terminal	Dishub
1	07	01	18	02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang dibangun/direhabilitasi	45 halte	1 halte	40.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 halte	Dishub
1	07	01	18	04	Pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah tambahan perahu yang dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan	256 unit	13 unit	937.770.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 unit	Dishub
						Jumlah demaga Sungai Dunian sisi darat yang tersedia	-	1 paket	19.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	07	01	18	07	Penataan Lokasi Parkir	Jumlah halaman parkir yang tersedia pada 19 titik dan pasar Junjung Buh	2 titik	-	-	19 lokasi	1.000.000.000,00	1 lokasi	5.000.000.000,00	1 lokasi	5.000.000.000,00				Dishub
1	07	01	18	13	Pembangunan Bandar Udara Tebelan sisi darat	Jumlah bandar udara Tebelan yang tersedia	1 unit	-	-	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	Dishub
1	07	01	18	17	Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Demaga/Pelabuhan	Jumlah fasilitas kelengkapan demaga/pelabuhan yang tersedia	2 unit	-	-	1 paket	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00 paket	Dishub
1	07	01	18	19	Penyelesaian ijin pembangunan Bandara Tebelan Sintang	Tersedianya dokumen IMB Bandara Tebelan Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	07	01	18	20	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bandar Udara Tebelan	Tersedianya dokumen rekomendasi teknis Bandar Udara Tebelan Sintang	-	1 kegiatan	76.487.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	07	01	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terciptanya arus lalu lintas yang tertib, aman dan lancar serta tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan													
1	07	01	19	01	Pengadaan rambu lalu lintas	Tersedianya rambu lalu lintas sungai	20 unit	30 unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 unit	Dishub
1	07	01	19	04	Pengendalian disiplin perlengkapan kendaraan di jalan	Terlaksananya pengawasan dan pemberian administrasi dan kelengkapan kendaraan darat dan sungai, pendataan rambu-rambu lalu lintas	1 kegiatan	25 kali	38.000.000,00	28 kali	41.800.000,00	32 kali	45.980.000,00	35 kali	50.578.000,00	35 kali	55.635.800,00	35 kali	Dishub
1	07	01	19	08	Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas	4 simpang	4 simpang	85.000.000,00	4 simpang	120.000.000,00	5 simpang	175.000.000,00	5 simpang	175.000.000,00	5 simpang	190.000.000,00	5 simpang	Dishub
1	07	01	19	09	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	Pembahasan Penyelesaian permasalahan lalu lintas	3 kali	3 kali	25.000.000,00	3 kali	30.000.000,00	6 kali	45.000.000,00	6 kali	45.000.000,00	6 kali	50.000.000,00	6 kali	Dishub
1	07	01	19	10	Pengadaan rambu lalu lintas (DAK)	Tersedianya rambu lalu lintas	188 bh	400 buah	640.000.000,00	400 buah	660.000.000,00	300 buah	510.000.000,00	250 buah	437.500.000,00	300 buah	540.000.000,00	300 buah	Dishub
1	07	01	19	11	Pengadaan marka jalan (DAK)	Tersedianya marka jalan sebagai petunjuk berlalu lintas	180 m2	600 m2	210.000.000,00	750 m2	300.000.000,00	750 m2	337.500.000,00	750 m2	375.000.000,00	750 m2	412.500.000,00	750 m2	Dishub



1	07	01	19	14	Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)	Tersedianya pagar pengaman jalan untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas	110 m	250 meter	437.500.000,00	300 meter	540.000.000,00	300 meter	540.000.000,00	400 meter	740.000.000,00	400 meter	740.000.000,00	400 meter	Dishub
1	07	01	19	19	Pengumpulan dan analisa data lalu lintas	Tersedianya data fasilitas keselamatan lalu lintas	1 dokumen	1 dokumen	5.500.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	Dishub
1	07	01	19	20	Survey rambu lalu lintas sungai	Jumlah dokumen data titik rambu lalu lintas sungai pada alur pelayaran sungai Ketungau dan Kayan													
1	07	01	19	21	Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Tersedianya APILL di persimpangan dalam kota Sintang	4 simpang	-	-	1 simpang	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	22	Pengadaan warning light	Tersianya warning light di daerah rawan kecelakaan lalu lintas	-	-	-	3 titik	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	23	Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Negara)	Ikut serta seleksi Kota Tertib Lalu Lintas	-	1 kegiatan	45.000.000,00	1 kegiatan	49.500.000,00	1 kegiatan	54.450.000,00	1 kegiatan	59.895.000,00	1 kegiatan	65.884.500,00	1 kegiatan	Dishub
1	07	01	19	24	Rekomendasi Teknis KKOP Bandar Udara Tebelian		-	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	Dishub
1	07	01	19	25	Kegiatan pengawasan terhadap dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai dan danau	Keamanan dan keselamatan awak kapal dan penumpang umum	-	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	Dishub
1	07	01	19	26	Pengawasan keselamatan alur pelayaran sungai dan danau	Terciptanya keamanan alur pelayaran bagi kapal angkutan sungai dan danau	-	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	Dishub
1	07	01	19	27	Pemeliharaan alat bantu sarana navigasi lampu penerangan di dermaga/pelabuhan	Terciptanya ketertiban dan keamanan di dermaga/pelabuhan	-	2 dermaga	80.000.000,00	2 dermaga	80.000.000,00	2 dermaga	80.000.000,00	2 dermaga	80.000.000,00	2 dermaga	80.000.000,00	2 dermaga	Dishub
1	07	01	19	28	Pemetaan alur pelayaran sungai kabupaten	Tersedianya data topografi dan hidrografi alur pelayaran sungai kabupaten	-	-	-	3 sungai	475.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	29	Kegiatan pengendalian dan pengawasan wilayah perairan daratan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lalu lintas di sungai	-	-	-	20 kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	Dishub
1	07	01	20		Program Peningkatan Ketelakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya gedung serta alat-alat penguji kendaraan bermotor yang baik di Kabupaten Sintang				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	20	01	Pengadaan gedung pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pekerjaan peningkatan gedung pengujian		1 paket	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	Dishub
1	07	01	20	02	Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang tersedia	3 unit											8 unit	Dishub
						- Axle Play Detector				1 unit	392.110.000,00	-	-	-	-	-	-		
						- Sound Level Meter				1 unit	46.600.000,00	-	-	-	-	-	-		
						- Alat Uji Dimensi Digital				1 unit	9.477.500,00	-	-	-	-	-	-		
						- Tint Window Meter				1 unit	39.100.000,00	-	-	-	-	-	-		
						- Side Slipe				1 unit	251.750.000,00	-	-	-	-	-	-		
1	07	01	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dikalibrasi	-	3 unit	50.000.000,00										
					JUMLAH				24.345.777.305,00		19.002.323.669,50		16.352.402.363,68		16.564.235.504,59		13.856.216.864,28		



5.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang di harapkan berdasarkan 6 (enam) program pokok pembangunan tersebut di atas, maka kegiatan-kegiatan pokok yang akan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang pada tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terminal angkutan darat yang meningkat fungsinya.

Dengan Kegiatan :

1) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal darat dalam kondisi baik.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Berfungsinya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dengan Baik.

Indikator Kinerja (Outcome) :



Jumlah terminal/pelabuhan/balai pengujian kendaraan bermotor/fasilitas perlengkapan jalan/alur pelayaran sungai yang terpelihara

Dengan Kegiatan :

1) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal/pelabuhan/balai pengujian kendaraan bermotor/fasilitas perlengkapan jalan /alur pelayaran sungai yang dalam kondisi baik.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Terciptanya Kelancaran, Keamanan dan Ketertiban Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terlaksananya pengawasan, pelayanan administrasi, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan dermaga.

Dengan Kegiatan :

1) Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan kendaraan darat.



- 2) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru di terminal.

- 3) Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan yang diberikan pelayanan perizinan administrasi kapal di tempat.

- 4) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah jenis bahan kelengkapan administrasi dan kelayakan pelayanan angkutan yang tersedia.

- 5) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan yang terlaksana.

- 6) Pembinaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pembekalan AKUT tingkat kabupaten

- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan tempat dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan



- 8) Pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten
- 9) Pendataan dan pengelompokan kapal angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan yang terdata kapal angkutan sungai
- 10) Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan tempat pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai
- 11) Survey penetapan jaringan trayek angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen jaringan trayek angkutan sungai yang dihasilkan
- 12) Pengamanan dan ketertiban di dermaga/pelabuhan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru di pelabuhan/dermaga.



4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas.

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan.

Dengan Kegiatan :

1) Pembangunan gedung terminal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal yang dibangun

2) Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah halte yang dibangun

3) Pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah tambatan perahu/dermaga/pelabuhan yang dibangun/direhabilitasi /ditingkatkan beserta dokumen perencanaannya.

4) Penataan lokasi parkir

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah halaman parkir yang tersedia pada 19 titik dan pasar Junjung Buih

5) Pembangunan Bandar Udara Tebelian sisi darat



Indikator Keluaran (Output) : Jumlah bandar udara
Tebelian yang dibangun

6) Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Dermaga/Pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah fasilitas
kelengkapan dermaga/pelabuhan yang tersedia

7) Penyelesaian izin pembangunan Bandara Tebelian
Sintang

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen IMB
Bandara Tebelian Sintang yang tersedia

8) Penyusunan Rekomendasi Teknis Bandar Udara
Tebelian

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen
rekomendasi teknis Bandara Tebelian Sintang yang
tersedia

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
*Terciptanya Lalu Lintas yang Terkendali dan Aman Bagi
Pengguna Jalan*

Indikator Kinerja (Outcome) :

Tingkat ketertiban arus lalu lintas, keamanan dan
kelancaran serta terciptanya keamanan dan kenyamanan
bagi masyarakat pengguna jalan.

Dengan Kegiatan :

1) Pengadaan rambu rambu lalu lintas



Indikator Keluaran (Output) : Jumlah rambu lalu lintas sungai terpasang

- 2) Pengendalian disiplin perlengkapan kendaraan di jalan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban administrasi dan kelengkapan kendaraan darat

- 3) Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pemberi isyarat yang dipelihara

- 4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah bahan kebijakan bidang lalu lintas yang dihasilkan

- 5) Pengadaan rambu rambu lalu lintas (DAK)

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang

- 6) Pengadaan marka jalan (DAK)

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah marka jalan yang tersedia

- 7) Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang

- 8) Pengumpulan dan analisa data lalu lintas

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen analisis data lalu lintas

- 9) Survey rambu lalu lintas sungai



Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen data titik rambu lalu lintas sungai pada alur pelayaran sungai Ketungau dan Kayan

10) Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah APILL yang terpasang di persimpangan dalam kota Sintang

11) Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Negara)

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan yang diikuti

12) Pengawasan keselamatan alur pelayaran sungai dan danau

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alur sungai yang dilakukan pengawasan pelayaran

13) Pemeliharaan fasilitas kelengkapan dermaga /pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan yang dipelihara

14) Pemetaan alur pelayaran sungai kabupaten

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen data topografi dan hidografi alur pelayaran sungai kabupaten

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Terciptanya Pemenuhan Standar Kelaikan Uji Kendaraan Bermotor



Indikator Kinerja (Outcome) :

Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum dan barang.

Dengan Kegiatan :

- 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pekerjaan peningkatan gedung pengujian

- 2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia

- 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dikalibrasi

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut ini:



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021						
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi	- meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik - meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik - meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
Salah satu indikator kinerja dari pelayanan transportasi adalah aksesibilitas yang rendah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	0		

Rencana Strategis 2016-2021 BAB V- 101

[illegible]



BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada sebagai berikut :

- Misi 3 RPJMD : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah
- Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
- Sasaran 9 : Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang

Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu:

1. Indikator Jumlah Infrastruktur Transportasi Yang Dibangun

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas untuk melayani angkutan orang dan barang. Jumlah pelabuhan/dermaga yaitu 2 unit, bandar udara 1 unit, dan 5 unit terminal penumpang.



Kedepannya diupayakan untuk menambah infrastruktur tersebut agar dapat melayani dan mendukung pergerakan orang dan barang guna mendukung pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Prioritas pembangunan tersebut yaitu penyelesaian Bandara Tebelian. Adapun target capaian dari indikator ini sebagai berikut:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Infrastruktur Transportasi Yang Dibangun	8	8	8	8	8	8	

2. Indikator Jumlah Infrastruktur Yang Dikembangkan dan Terpelihara

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana prasarana transportasi yang sudah dibangun sehingga dapat berfungsi maksimal. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur jalan dan semakin tingginya aktivitas perekonomian masyarakat, mengakibatkan penggunaan sarana prasarana transportasi meningkat dan mengurangi umur barang. Adapun rencana pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi infrastruktur transportasi sebagaimana tabel berikut ini:



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Infrastruktur Yang Dikembangkan dan Terpelihara	25	30	35	40	45	50	

3. Indikator Jumlah Tempat Parkir Yang Ditata

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 menuntut untuk disediakan tempat parkir yang layak sehingga dapat menghindari kemacetan dan ketidaktertiban di jalan raya. Hingga saat ini telah dilaksanakan penataan tempat parkir pada 3 lokasi dalam kota Sintang. Selanjutnya akan dilaksanakan penataan tempat parkir pada beberapa lokasi dalam kota Sintang sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Tempat Parkir Yang Ditata	3	0	19	1	1	23	

4. Indikator Jumlah Rambu Yang Terpasang

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan pengadaan rambu jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan, traffic light serta fasilitas jalan lainnya sebagai upaya untuk penertiban, pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas serta peningkatan keamanan berkendara di jalan. Jumlah



rambu terpasang dari tahun 2010-2016 adalah 1.153 unit tersebar pada 8 kecamatan dalam Kabupaten Sintang. Kedepannya dibutuhkan 26.150,11 unit rambu lalu lintas untuk 4.508,64 km panjang jalan dalam Kabupaten Sintang yang berstatus jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Adapun target capaian dari indikator ini sebagai berikut:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Rambu Terpasang	1153	500	500	500	500	2500	

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terdapat juga indikator-indikator kinerja lain dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dalam kondisi baik
- 2) Jumlah pagar pengaman jalan dalam kondisi baik
- 3) Jumlah CCTV dalam kondisi baik
- 4) Jumlah traffic light dalam kondisi baik
- 5) Jumlah fasilitas terminal dalam kondisi baik
- 6) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
- 7) Jumlah halte yang dilakukan pemeliharaan
- 8) Jumlah alur pelayaran sungai yang dilakukan pemeliharaan



- 9) Jumlah bahan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dihasilkan
- 10) Jumlah penghargaan/pelopor yang diterima
- 11) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
- 12) Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban terminal
- 13) Jumlah peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan
- 14) Jumlah peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan
- 15) Jumlah kegiatan pengendalian, pengawasan dan penertiban di perairan sungai
- 16) Jumlah kendaraan yang diuji kelaikan
- 17) Jumlah alat mekanis pengujian kendaraan bermotor yang tersedia
- 18) Jumlah terminal yang meningkat fungsinya
- 19) Jumlah dokumen kepemilikan aset yang sah
- 20) Jumlah aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.



BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin SKPD dalam mengembangkan Visi merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memiliki Misi, Visi,



Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang lebih baik.